

Judul : Agun Gunanjar Sudarsa, pengabdian selama 7 periode di Senayan
Tanggal : Jumat, 16 Agustus 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 25

Agun Gunandjar Sudarsa

Pengabdian Selama 7 Periode Di Senayan



OKTOBER 2024. Agun Gunandjar Sudarsa akan dilantik sebagai anggota DPR periode 2024-2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X. Bagi Agun, ini bukanlah pelantikan yang pertama sebagai anggota DPR. Agun sudah 7 kali ikut Pemilu Legislatif (Pileg), semuanya berhasil.

Agun bukan politisi kaleng-kaleng. Berbagai jabatan strategis sudah dipegangnya. Dia juga sudah ditugaskan di berbagai komisi di DPR.

Kini, memasuki pengabdian yang ke-7 di DPR, apa saja yang sudah dilakukan Agun? Apa pandangannya tentang kondisi parlemen sekarang? Berikut wawancara lengkapnya:

Anda 7 kali ikut Pemilu, semuanya berhasil. Apa resepnya?

Sederhana aja. Menang kalah buat saya itu sudah ada suratannya. Karena buat saya, politik juga tidak semata-mata hanya kalah dan menang duduk di kursi, ini juga ibadah. Tidak terpilih jadi anggota DPR, lalu dia kalah? Ngak juga. Pasti digantikan dalam bentuk yang berbeda. Bisa saja tidak DPR, tapi ada di posisi lain. Sehingga saya cenggak ada beban.

Jadi saya jalankan hidup itu sebagai perjalanan waktu. Saya jalani sebagaimana waktunya. Ketika saya di rumah, saya jadi orang rumah. Ketika saya di parlemen, saya harus jadi anggota parlemen yang harus berbicara menyampaikan gagasan pemikiran. Ketika saya di lingkungan, saya bertanggung jawab. Ketika saya di dapil, saya bekerja untuk dapil. Dan saya yakin kebaikan itu akan berbuah kebaikan. Jadi optimisme saja.

Realitasnya, di Pemilu 2024 kemarin, banyak incumbent yang gagal...

Jujur saya mengatakan, memang ada sedikit ketar-ketir. Sampai menjelang pemungutan itu di dapil, masyarakat sudah terang-terangan tanya "Mana uang sawemnya dari Pak Agun?". Padahal karang apa saya itu. Selalu perhatian dapil, kasih bantuan dan sebagainya.

Lantas Anda juga tergoda untuk lakukan money politic?

Oh tidak. Saya selalu sampaikan ke masyarakat, kalau Anda memilih karena faktor yang memang tidak baik, itu akan ada konsekuensinya. Wakil Anda selama 5 tahun tidak akan perhatian pada Anda. Karena orang tersebut akan berpikir untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan saat kampanye.

Apakah itu efektif?

Saya menyampaikan itu, karena masyarakat di dapil juga tahu apa yang sudah saya perbuat selama ini. Makanya banyak juga yang datang malah membawa amplop. Kataannya amplop itu, berasal dari si A, si B, dan lainnya. Mereka bilang ke saya, meskipun banyak amplop yang datang, saya tetap sama bapak. Kami tahu bagaimana pengorbanan Bapak selama ini. Kalau ada orang sakit dibantu, disiapkan ambulans segala rupa. Saat pandemi Covid-19, bapak turunkan sembako. Menurut mereka, itu jauh lebih berarti, dibandingkan dengan nilai amplop yang diterima jelang pencoblosan. Dan Alhamdulillah, saya masih dipercaya dan terpilih kembali.

Banyak yang bilang, harga kursi DPR itu mahal banget. Banyak yang habis belasan hingga puluhan miliar...

Kalau bicara kalkulasi, bisa diprediksi sebetulnya. Misalnya, di lapangan itu ada yang bagi-bagi amplop dari Rp 100 ribu sampai Rp 300 ribu. Nah kalau satu suara saja dirata-ratakan Rp 100.000 kan bukan lagi hitungannya juta atau miliar, itu sudah bermiliar-miliar. Kalau untuk menjadikan satu kursi itu kan paling tidak butuh 200 ribu suara, lalu dikali Rp 100 ribu atau Rp 300 ribu, sudah ketahuan hasilnya. Itu baru buat serangan fajar. Belum kampanye hingga alat peraga kampanye.

Bagaimana dengan Anda?

Kalau ditanya total, secara keseluruhan ya mungkin saya juga sama besarnya seperti itu. Tapi saya tidak dengan cara *cash and carry* seperti itu, dengan cara bagi-bagi amplop. Selama 5 tahun saya bekerja. Di DPR itu ada masa reses berapa kali dalam setiap tahun. Kalau dalam seriap reses itu saya berkumpul, bertemu dengan masyarakat, memberikan uang saku, konsumsi, itu sudah ketahuan nilainya. Maka kalau reses itu 7-9 kali, dan setiap reses habis Rp 200 sampai 300 juta. Maka totalnya dalam 1 tahun sudah besar, apalagi di kali 5 tahun.

Itu pun belum termasuk sembako dan sumbangan dari kemitaan dalam bentuk CSR. Kalau ditotal juga puluhan miliar. Jadi kalau selama 5 tahun untuk jadi suara itu itu memang besar. Namun, saat Pemilu, saya hanya menyipikan balho, kaos, souvenir seperti parfum untuk dibagi-bagi. Ya kurang lebih sekitar Rp 5 miliar-lah. Tapi itu yang bukan untuk serangan fajar lho ya, he he he.

Politik uang itu merusak kualitas demokrasi, tentu ini tidak bisa dibalaskan terus berulangnya di setiap pemilu...

Secara jujur saya harus mengatakan bahwa pemilu yang terbaik itu hanya di Pemilu tahun 1999 dan pemilu tahun 2004. Karena Pemilu 1999 itu awal reformasi, semua orang masih pada ada gagasan, ingin sesuatu perubahan yang terbaik, murni memilih. Di pemilu 2004, partai politik masih pada

semangat ingin melanjutkan reformasi yang benar. Dan partai politik pada saat itu kuat. Karena seriap partai politik mendapatkan dukungan dana dari negara. Pada saat itu, partai dapat Rp. 1000 per satu suara.

Begitu 2004 berlangsung Pilpres pertama kali dilakukan, Pak SBY terpilih. Saat itu, mulai terjadi perubahan. Dana parpol turan drastis dari Rp 1000 menjadi Rp 108 per suara. Karena dana berkurang, parpol mulai goyah. Sebab, biaya operasional parpol itu tidak murah.

Apakah yang terjadi? Kekuasaan mulai membuka ruang masuk kabinet, makanya korupsi terjadi pada zaman SBY. Begitu pula juga dengan masuknya para pengusaha ke parpol, nepotisme di tubuh partai. Sehingga pada pemilu berikutnya, politik uang langsung marak. Ditambah lagi sistem pemilu diubah dari tertutup menjadi terbuka, demokrasi menjadi rusak.

Berarti masalahnya pada sistem Pemilu tertutup dan terbuka...

Kalau menurut saya persoalan itu bukan pada tertutup dan terbuka, tapi lebih kepada fungsi partai politik. Kalau fungsi partai politiknya dalam menjalankan fungsi rekrutemennya benar, lewat jalur kaderisasi, itu bisa dicegah. Fungsi representasi dan fungsi rekrutemennya dalam menjalankan tata kelola partai politik yang amanah harus benar-benar dilakukan.

Sebelum seseorang itu jadi calon legislatif (caleg), harus ada sertifikasi kompetensi. Bagaimana cara mengukurnya? Tak lain dari sertifikasi pengkaderan. Kalau untuk nasional, tidak mungkin anak dari sebuah Kabupaten/Kota, atau anak pejabat sekalipun anak gubernurnya langsung jadi caleg, enggak bisa. Dia harus melewati sertifikasi, apakah sudah layak untuk maju di level nasional. Kedua, ada dukungan publik. Nah dukungan publik untuk di pusat itu siapa, tidak cukup hanya wakil yang ada di bawah. Ketiga, ada uji publik. Semua itu, bisa dilakukan bila parpol memiliki dana operasional yang cukup.

Lantas apa masalahnya?

Masalahnya saat ini, karena sumber

pendanaan berkurang, maka partai terbebani. Partai saat ini diisi, kalau tidak keluarga pejabat, anak pejabat, istri pejabat atau pengusaha. Di situ uang mulai memainkan segala-galanya. Jadi menurut saya memang demokrasi kita hari ini demokrasi yang bukan maju, tapi mundur dan sangat mundur dibandingkan dengan awal reformasi. Bahkan sudah bertolak belakang dengan cita-cita reformasi. Kalau tata kelola partai politik seperti ini, apa yang bisa diharapkan di parlemen.

Apakah ini juga yang menyebabkan kualitas wakil rakyat kita di parlemen makin menurun?

10 tahun ini memang harus diakui terjadi kemunduran terentang peran dan fungsi parlemen. Terutama fungsi kontrol terhadap eksekutif itu melemah. Apakah melemah itu karena peran oposisi yang berkurang, menurut saya tidak juga. Melemah itu karena instrumen partai politiknya yang terlalu dominan dikuasai hanya sekelompok orang-orang tertentu. Kalau berbeda pendapat, lalu digeser. Makanya orang takut untuk berbicara. Semua sudah ditentukan dari atas, harus begini-begitu.

Makanya wajar saja kalau kemudian masyarakat memberikan penilaian bahwa kualitas DPR sekarang berkurang. Karena masyarakat mengetahui sama sekali kapan undang-undang itu dibahas, kapan uji publiknya, tiba-tiba ketok paku. Kalau dulu kan undang-undang itu sebelum diketok paku, kita bawa ke ke seluruh Indonesia dulu. Masuk ke kampus-kampus, diuji dulu segala macam, lalu kumpul lagi fraksi menyampaikan pandangan. Namun sekarang, itu nyaris tidak ada. Wajar kalau publik memberikan penilaian buruk. Dan saya menerima penilaian buruk itu, termasuk diri saya bagian yang buruk, saya terima.

Kalau sudah begini, apa solusi utama dari semua permasalahan ini?

Jujur saya mengatakan, yang paling utama ke depan harus dibenahi dalam menanganai kesejahteraan Indonesia, keadilan, kemakmuran dari sebuah tujuan kita bernegara dan kita sudah memilih demokrasi sebagai prosesnya.

maka partai politik yang harus dibenahi. Jangan salahkan dulu KPU, karena KPU yang milih juga partai politik kok. Jangan nyalahkan MA (Mahkamah Agung), jangan salah MK (Mahkamah Konstitusi), karena semua lewat proses politik di parlemen. DPR itu milih hakim MK, hakim MA, Komisi Yudisial, BPK, KPK, Gubernur BI, OJK dan lembaga politik lainnya.

Kalau partai politik itu benar benar menjalankan fungsi representasi, dia mengagregasi, menyerap aspirasi rakyat ini, mau berdiskusi dan berdialog dengan rakyat dan pakar, maka produk dan pilihan yang dibuat DPR akan bagus juga.

Partai politik harus dibenahi dalam menjalankan fungsi representasinya. Wakil rakyat turun ke dapil, serap aspirasi. Lalu itu dirumuskan dalam sebuah kebijakan di komisi-komisi terkait.

Penguatan partai politik itu tidak mudah, butuh biaya. Kalau negara mau kasih besar, ini akan dicurigai oleh publik...

Sepergi yang saya bilang, untuk penguatan partai politik kan ada biaya operasional. Kalau di era Presiden Gus Dur dulu, dana partai itu Rp 1.000 per suara. Sedangkan sekarang sudah dipangkas jauh jadi Rp 108 per suara.

Berapa idealnya?

Misalkan sekarang ada 10 parpol yang lolos ke DPR. Misalkan dipukul rata, setiap parpol dikasih Rp 1 triliun tiap tahun. Maka negara hanya keluar Rp 10 triliun. Dana Rp 1 triliun bagi sebuah partai politik itu sudah cukup. Parpol mampu menjalankan fungsi fungsi kepartaiannya dengan baik tapi bergantung kepada pengusaha atau oligarki.

Dana Rp 10 triliun dari APBN itu yang mencakup Rp 3 ribu triliun, itu masih kecil. Saya yakin stop semua sumber pembiayaan-pembiayaan dari luar. Manfaatkan dana itu dengan sebaik-baiknya untuk kaderisasi, edukasi segala rupa, maka akan tercipta kader-kader yang baik. Karena merasa uang itu yang negara dalam tata keluarganya pun tidak akan semena-mena. Terpenting, perencanaan sampai kepada pengawasan, auditnya harus jelas. ■ **SIKSI**